

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Mohammad Natsir merupakan tokoh modernisme Islam yang senantiasa memandang Islam secara multi dimensional dan menganggapnya sebagai ajaran yang universal, berlaku bagi kompleksitas kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun.

Pemikiran politik Mohammad Natsir dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena politik dapat memotivasi berlangsungnya dinamika keagamaan. Antara negara sebagai lembaga politik dengan agama mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Islam tidak memberi gambaran yang jelas tentang bentuk dan sistem pemerintahan negara, artinya suatu negara boleh menggunakan sistem apa saja, asal sesuai dengan tujuan negara Islam, yaitu berlakunya ketentuan-ketentuan ilahi atas manusia. Negara dalam konsepsi Islam tidak lebih dari sekedar alat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Hak asasi manusia dijamin oleh Islam. Hak-hak ini harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip persamaan tanpa ada diskriminasi ras, warna kulit,

ketu-runan, kebangsaan dan lain-lain. Islam juga tidak membenarkan pemaksaan dalam beragama dan tidak mengizinkan superioritas serta dominasi struktural antar golongan.

4. Hubungan internasional harus dilandasi asas persamaan dan dilakukan secara bebas aktif. Hubungan antar bangsa ini penting karena dapat menjadi wahana akulturasi budaya, sehingga apabila dilaksanakan secara positif dapat memacu ummat Islam untuk selalu bergerak dinamis.

Pemikiran Mohammad Natsir dilaterbelakangi oleh visi politisnya yang jauh ke depan. Ia merupakan seorang berpikiran maju yang jauh-jauh hari telah memandang kepentingan kaum muslimin sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan meski harus menemui banyak rintangan dan membutuhkan banyak pengorbanan. Kondisi sosial politik di Indonesia semasa ia hidup juga sangat mempengaruhi sikap terjang prilaku politiknya, terutama sikap kontroversialnya terhadap pola sekulerisme yang dimotori Soekarno. Disamping itu keterlibatannya secara langsung dalam kancah politik praktis juga mengharuskannya untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang cenderung kompromistik.

Tendensi pemikiran Natsir mengarah pada modernisme politik Islam, yang mempunyai ciri elastis dan fleksibel, dan berkarakter universal, kontekstual, akulturatif, kompromistik, realistik, dan rasional. Pemikiran semacam ini banyak dipengaruhi oleh posisinya sebagai orang yang terlibat langsung dalam percaturan

kekuasaan saat itu, disamping juga dilatarbelakangi oleh pendidikannya yang sejak kecil belajar pada sekolah-sekolah Belanda yang cenderung berhaluan barat.

B. Saran-saran

1. Pada tahun 1995 K.H. Hasan Basri, ketua umum MUI Pusat, mempunyai gagasan mengusulkan Mohammad Natsir untuk menerima penghormatan sebagai Pahlawan Nasional. Anugerah ini tidak saja pantas diterima Natsir, tetapi mestinya sudah menjadi kewajiban sejarah untuk mengakui kepahlawanannya dalam membela integritas negeri ini sejak zaman penjajahan, peralihan kekuasaan, orde lama, dan orde baru sekarang ini. Tetapi usulan ini belum mendapat respon serius dari pemerintah. Oleh karena itu kepada semua pihak yang masih mempunyai komitmen kepada realita sejarah perjuangan Natsir khususnya dan fenomena sejarah bangsa Indonesia pada umumnya, sudilah kiranya menindaklanjuti usulan ini.
2. Bangsa Indonesia sebenarnya memiliki pemikir-pemikir yang kualitasnya tidak kalah dibandingkan dengan tokoh-tokoh pemikir internasional lainnya, oleh karena itu ada baiknya kepada semua pihak yang berkompeten terhadap studi-studi ilmiah untuk menggali pemikiran tokoh-tokoh kita sendiri.
3. Islam memiliki ajaran yang sangat kompleks di semua bidang kehidupan manusia, hanya saja ajaran ini perlu digali sehingga bisa diaplikasikan semaksimal mungkin bagi penyelesaian permasalahan umat.